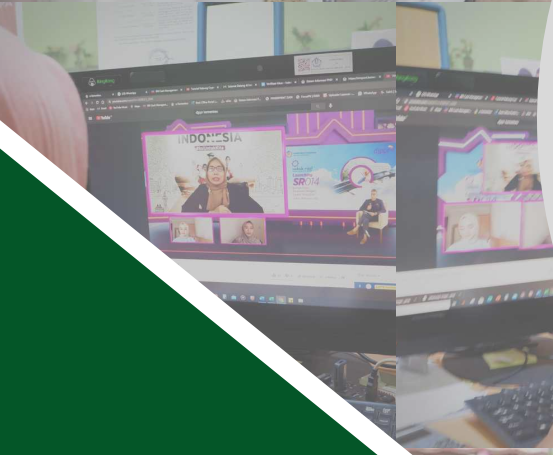


NO

LAPORAN KINERJA

KPKNL
LAHAT *sevelo*





TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA KPKNL LAHAT



DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi

BAB 1 - PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	14
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
c. Wilayah Kerja KPKNL Lahat	20
d. Mandat yang Diberikan kepada KPKNL Lahat	21
e. Permasalahan Utama	22
f. Sistematika Laporan	23

BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA

a. Peran Strategis	26
b. Rencana Strategis	27
c. Peta Strategi Tahun 2021	28
d. Kontrak Kinerja	29

BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja KPKNL Lahat	34
1. Target dan Realisasi Tahun 2021	34
2. Pencapaian KPKNL Lahat	37
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	42
b. Realisasi Anggaran	55
c. Data dan Narasi Kinerja Lainnya	56

BAB 4 - PENUTUP

a. Simpulan	60
b. Saran	62

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Lahat Tahun 2021	66
2. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lahat Tahun 2021	74

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pembaca yang terhormat,

Adalah menjadi kewajiban kami selaku instansi pemerintah untuk memberikan layanan profesional dan terbaik sesuai tugas kami di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sudah tentu, seluruh capaian kami dalam melaksanakan tugas harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada para stakeholder.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Capaian Kinerja KPKNL Lahat tahun 2021. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Balance Score Card (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Lahat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Lahat tahun 2021. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 111,52% dari nilai maksimal 100%.

LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Lahat serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Lahat kami berikan apresiasi yang tinggi atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lahat, 31 Januari 2022
Kepala Kantor

MASDJAYA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Lahat Tahun 2021. LAKIN Tahun 2021 tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN selaku instansi vertikal yang membawahi KPKNL Lahat yaitu: **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2021 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Lahat dalam meningkatkan kinerja. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2021 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024.

LAKIN memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, sebagai organisasi yang terus berkembang, KPKNL Lahat sebagai ujung tombak kantor pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu memiliki kontrol yang baik dalam memantau kinerja yang menjadi tujuan organisasi.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Lahat menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sepanjang tahun 2021, KPKNL Lahat telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 120%;
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 106,22%
3. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 103,54%;
4. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 104,37%;
5. Persentase realisasi pokok lelang sebesar 97,55%;
6. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL sebesar 103,70%;
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 100%;
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN yang disertifikatkan (portofolio aset) sebesar 120%;
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 120%;
10. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN (addendum) sebesar 120%;
11. Persentase produktivitas lelang sebesar 120%;
12. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebesar 108,70%;
13. Deviasi data PNBPFungsional DJKN sebesar 120%;
14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 104,23%;
15. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara sebesar 117,65%;
16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai sebesar 120%;
17. Nilai hasil review pengelolaan kinerja sebesar 120%;
18. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator sebesar 103,87%;
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 103,87%.

**NKO KPKNL
LAHAT TA. 2021
MENCAPAI
111,52%,
ADAPUN
SEBAGAI
PERBANDINGAN
NKOTA. 2020
(112,05%) DAN
T.A. 2019
(102,93%)**

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 111,52 % dari nilai maksimal 100%.

Jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2021 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar 112,05% dan 102,93%, KPKNL Lahat secara konsisten mempertahankan kinerjanya setiap tahun.

Ke depan, KPKNL Lahat akan bekerja lebih inovatif guna meningkatkan capaian-capaian strategis sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak saja optimal dan akuntabel (prinsip *Good Governance*) tetapi juga aplikatif dan inovatif.



**PEMBANGUNA
ZONA INTEGRIT**

enuju
ayak dari
at



gan Se

KEPALA KPKNL LAHAT





PENDAHULUAN



SELAMAT DATANG DI KPKNL LAHAT



KPKNL
LAHAT



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

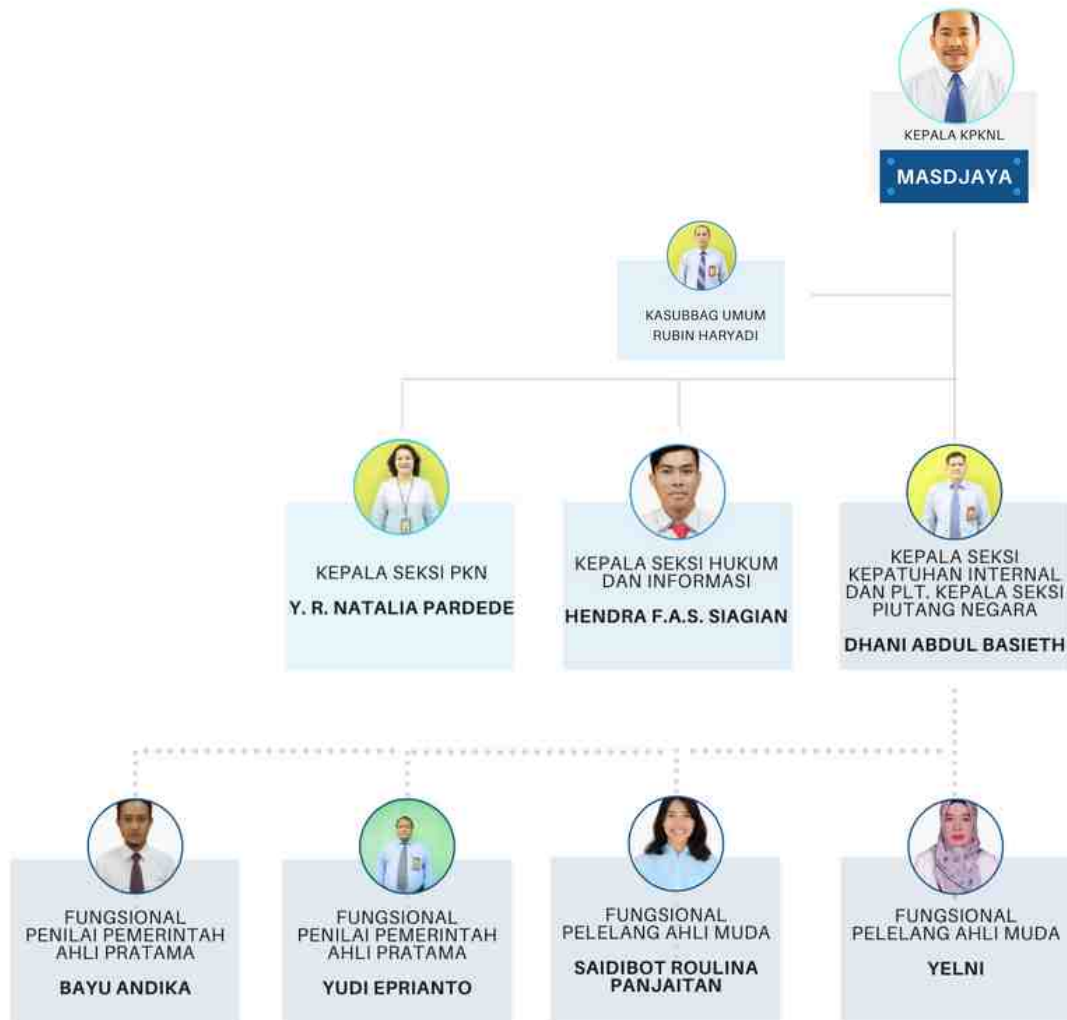
Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Lahat dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Lahat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Lahat terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor) dan 7 (tujuh) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum) dan 4 (empat) pejabat fungsional.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



VISI

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Kepala KPKNL Lahat, seluruh pegawai KPKNL Lahat telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Visi dimaksud menjadi semangat sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas. visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam frasa per frasa.

Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.



Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontribusi** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset dan di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Lahat menetapkan Misi yang selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUJUAN

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan KPKNL Lahat memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien.

SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Lahat dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
- Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
- Terselenggaranya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Piutang Negara

- Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
- Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS);
- Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.

C. Pelayanan Lelang

- Terselenggaranya pelayanan lelang bersih, transparan dan akuntabel;
- Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang.

D. Pelayanan Penilaian

- Penertiban BMN satker K/L tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2019 yang optimal;
- Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib;
- SDM Penilai yang handal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

E. Hukum dan Informasi

- Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.

F. Kepatuhan Internal

- Pelaksanaan SOP Unggul tepat waktu;
- Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
- Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
- Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
- Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
- Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat



G. Umum

- Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi baik di Kantpr Wilayah maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lahat menyelenggarakan fungsi di antaranya sebagai berikut:

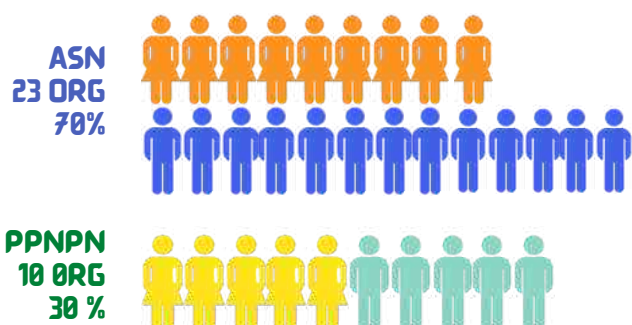
- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- Penyajian bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyajian data usul penghapusan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



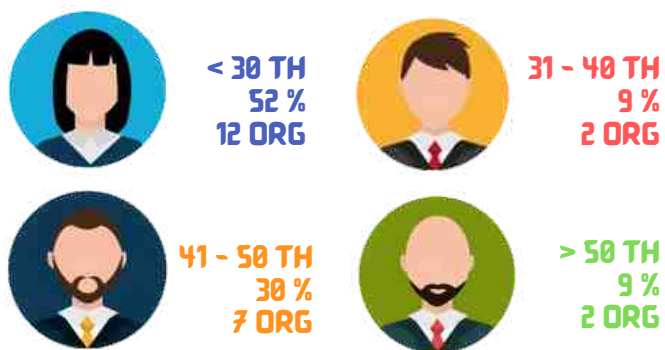
KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Lahat memiliki 23 (dua puluh tiga) Pegawai ASN serta didukung oleh 10 (sepuluh) Pegawai PPNPN (honorar). Adapun komposisi pegawai ASN pada KPKNL Lahat dapat dipertakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia dan kelompok fungsional.

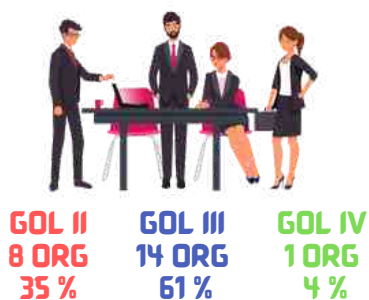
KOMPOSISI PEGAWAI ASN - PPNPN



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



KOMPOSISI PEGAWAI

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



KOMPOSISI PEGAWAI KELOMPOK FUNGSIONAL KHUSUS



C. WILAYAH KERJA KPKNL LAHAT

KPKNL Lahat merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 8 (delapan) kota dan/atau kabupaten. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

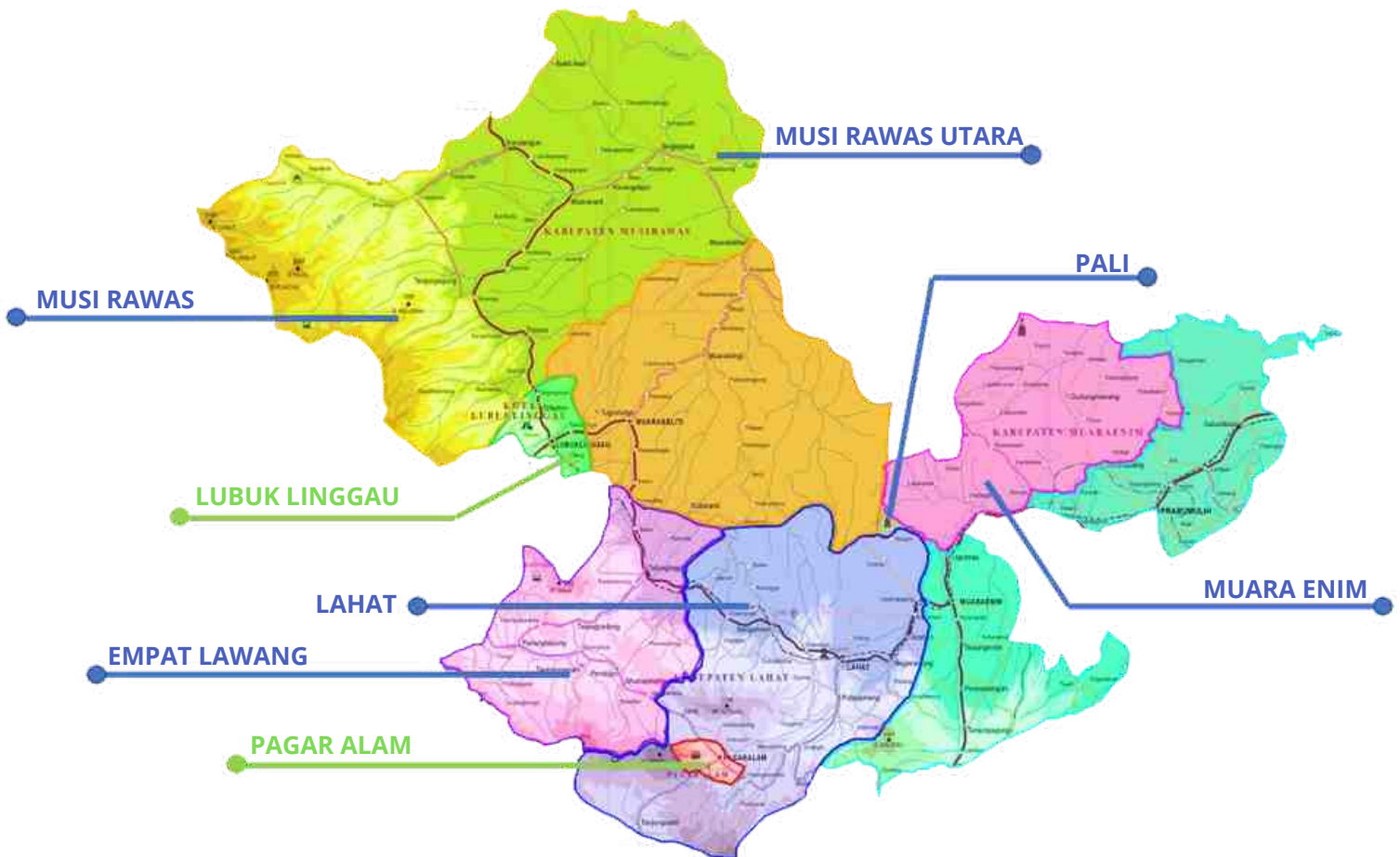


2 KOTA

LUBUK LINGGAU
PAGAR ALAM

6 KABUPATEN

LAHAT
MUARA ENIM
MUSI RAWAS
MUSI RAWAS UTARA
EMPAT LAWANG
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)



KPKNL Lahat sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Lahat dikelompokkan dalam 2 (dua) tema pokok, yaitu:

- Tema **Kekayaan Negara** dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- Tema **Pendapatan Negara** dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- Membuat usulan atas peraturan-perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pegurusan piutang negara dan lelang;
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengelolaan Anggaran;.



E PERMASALAHAN UTAMA

Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan merupakan salah satu program lanjutan dari program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2007 silam. TK Kementerian Keuangan bertujuan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang bertaraf internasional yang memegang peranan penting dalam program pembangunan bangsa. Kementerian Keuangan sebagai institusi penting di negara ini memiliki peran-peran strategis yang berkaitan dengan perekonomian bangsa tentunya memerlukan perbaikan di semua instansi.

TK adalah wujud dari perubahan organisasi, model bisnis, sumber daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke dalam bentuk yang berbeda yang mampu merespon perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan fungsi DJKN dari *asset manager* tentunya berdampak pada perluasan cakupan pengelolaan kekayaan negara yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. KPKNL Lahat sebagai institusi di bawah lingkungan DJKN pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam tugas *special mission* untuk mengurus Piutang Negara, Penilaian dan Lelang. Hal tersebut membuat cakupan tugas KPKNL Lahat menjadi semakin berkembang di masa mendatang.

KPKNL Lahat sebagai satu institusi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik sehingga hal ini mengharuskan KPKNL Lahat untuk terus mendukung dan melayani *stakeholder* lebih inovatif dan efisien.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat tahun 2021 terdiri dari:

1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Lahat, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) KPKNL Lahat.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2021.

3. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan hasil capaian kinerja, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan dengan beberapa tahun sebelumnya, pencapaian tahun ini dengan Rencana Strategis KPKNL Lahat 2019-2024 atau target jangka menengah, evaluasi dan analisa keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja termasuk program atau kegiatan penunjang atau tambahan. Disajikan pula realisasi anggaran untuk mencapai target sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Lahat.

4. Penutup

Bagian penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Lahat, kendala dan/atau hambatan yang dihadapi serta saran dan masukan yang dapat dilakukan oleh KPKNL Lahat di masa mendatang agar dapat terus meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Lampiran menyajikan dokumen Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat tahun 2021 serta dokumen/hal lain yang dianggap perlu.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



A. PERAN STRATEGIS

KPKNL Lahat memiliki peran strategis organisasi dalam hal sebagai berikut:

MANAJEMEN ASET NEGARA

KPKNL Lahat berperan mengoptimalkan pengelolaan aset negara/BMN. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan upaya-upaya antara lain utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara sampai dengan tahap *asset disposal* serta didukung dengan penilaian untuk informasi nilai aset yang wajar sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik.

Selain itu KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam mendorong satuan kerja untuk mengamankan aset melalui program sertifikasi tanah BMN.

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

KPKNL Lahat bereperan dalam pengurusan Piutang Negara/daerah yang dilakukan melalui berbagai proses/tahapan penyelesaian Piutang Negara. Sejalan dengan kebijakan pengembalian Piutang Negara eks BUMN, KPKNL Lahat lebih fokus dalam menggali peluang penyelesaian Piutang Negara baik Pusat maupun daerah.

PELAYANAN LELANG

KPKNL Lahat berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara, KPKNL Lahat memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Lahat memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

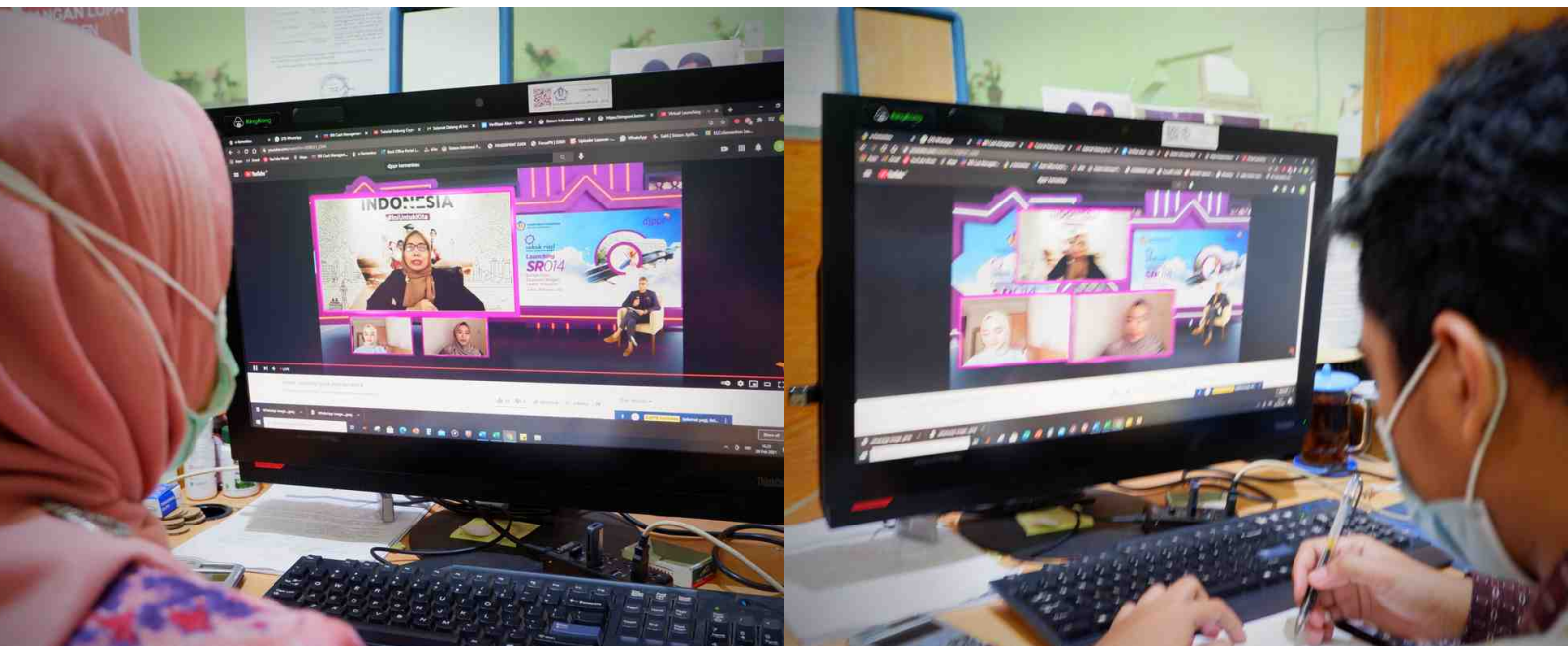
B. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2020, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-2915/KN.1/2020 Hal Penyampaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 Tanggal 09 September 2020 disampaikan bahwa para Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk KPKNL Lahat untuk dapat mendukung mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

TUJUAN

Sejalan dengan Rencana Strategis DJKN dan misi yang diemban, KPKNL Lahat mempunyai tujuan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
4. Peningkatan pelayanan penilaian;
5. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
6. Peningkatan pelayanan lelang;
7. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.



SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, KPKNL Lahat menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2021 yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang fit for purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

C. PETA STRATEGI TAHUN ANGGARAN 2021



D. KONTRAK KINERJA

Perjanjian/kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Lahat memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 9/KN.15/2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,60
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%



6.	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90,50
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Berdasarkan *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Tahun 2020, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Utama (IKU) yaitu Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; Tingkat outstanding piutang negara; Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK; Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL; Persentase hasil lelang (Pokok Lelang); Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang; Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan; Persentase efektivitas penyelesaian BKPN; Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi; Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset); Deviasi ketergunaan hasil penilaian; Persentase produktivitas lelang; Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction; Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi; Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset; Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN; Persentase pengembangan kompetensi pegawai; Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC; Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai; dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.





AKUNTABILITAS KINERJA





BAB 3



Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Lahat tahun 2021 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun 2020, 2019 dan 2018 sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2021.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

A. CAPAIAN KINERJA KPKNL LAHAT

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Lahat pada tahun 2021 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

1. TARGET DAN PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN 2021

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2021	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1			Pengelolaan kekayaan negara yang optimal								
	1a-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan IMN dengan SBSK	62%							
			a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	Bobot 75%		87,27%	87,27%	91,15%	91,15%	91,15%	91,15%
			b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020	Bobot 25%		100,00%	100,00%	92,69%	92,69%	92,69%	92,69%
			Capaian IKU			90,40%	90,40%	91,54%	91,54%	91,54%	91,54%
	1b-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK							
			a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.094.000.000	Rp 275.342.472	Rp 741.253.753	Rp 741.253.753	Rp 1.262.972.683	Rp 1.262.972.683	Rp 2.828.703.945	Rp 2.828.703.945
			b. PNBP Piutang Negara (addendum)	Rp11.600.000	Rp 9.931.790	Rp 11.515.315	Rp 11.515.315	Rp 13.972.218	Rp 13.972.218	Rp 13.972.218	Rp 13.972.218
			c. PNBP Lelang	Rp1.926.000.000	Rp 114.183.956	Rp 362.047.022	Rp 362.047.022	Rp 489.832.180	Rp 489.832.180	Rp1.439.645.565	Rp 1.439.645.565
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp4.031.600.000	Rp 399.458.218	Rp 1.114.816.089	Rp 1.114.816.089	Rp 1.766.777.081	Rp 1.766.777.081	Rp 4.282.321.728	Rp 4.282.321.728
			Capaian IKU		9,90%	27,652%	27,652%	43,823%	43,823%	106,319%	106,319%
	1c-CP	P/M	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNOS s.d 2017)	MAX/TLK							
			Target/Realisasi (addendum)	Rp1.382.000.000	Rp92.646.100,67	Rp1.381.929.865	Rp 1.381.929.865	Rp1.430.929.864	Rp 1.430.929.864	Rp 1.430.929.864	Rp 1.430.929.864
			CAPAIAN IKU		6,70%	99,99%	99,99%	103,54%	103,54%	103,54%	103,54%
2			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	P/H	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	MAX/AVG							
			Target/Realisasi	88	98,72	100,00	99,36	100,00	99,57	99,24	99,49
			Capaian IKU		98,72	100,00	99,36	100,00	99,57	99,24	99,49
	2b-CP	P/M	Persentase realisasi pokok lelang	MAX/TLK							
			Pokok Lelang Kelas I	Rp42.000.000.000	Rp537.239.999	Rp2.915.878.388	Rp 2.915.878.388	Rp4.250.761.354	Rp4.250.761.354	Rp26.522.658.714	Rp26.522.658.714
			Pokok Lelang Pegadaian:	Rp7.000.000.000	Rp4.473.407.800	Rp9.856.356.248	Rp 9.856.356.248	Rp15.840.488.500	Rp15.840.488.500	Rp21.275.998.800	Rp21.275.998.800
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp49.000.000.000	Rp5.010.647.799	Rp12.772.234.636	Rp12.772.234.636	Rp20.091.249.854	Rp20.091.249.854	Rp47.798.657.514	Rp47.798.657.514
			Capaian IKU		10,23%	28,07%	26,07%	41,00%	41,00%	87,56%	87,56%



3		Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien															
3a-CP	E/M	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	MAX/TLK														
		Target/Realisasi	4,60							4,77	4,77						
Capaian IKU											103,70%						
4		Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif															
4a-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK														
		Target/Realisasi	242		6	6	30	30		242	242						
Capaian IKU											2,48%	2,48%	12,40%	12,40%	100,00%	100,00%	
4b-CP	P/H	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK														
		Target/Realisasi (addendum)	30	8	27	27	36	36		36	36						
Capaian IKU											26,67%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
4c-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK														
		Target/Realisasi	22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
Capaian IKU											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5		Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif															
5a-CP	P/M	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (addendum)	20	0	19	19	26	26		26	26						
Capaian IKU											0,00%	95,00%	95,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%
5b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK														
		Jumlah Frekuensi lelang Laku Secara keseluruhan		5	19	19	26	26		142	142						
		Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan		22	44	44	73	73		220	220						
% Lelang laku keseluruhan											22,73%	43,18%	43,18%	35,62%	35,62%	64,55%	64,55%
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000		-	-	-	-	-		-	-						
		Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000		-	-	-	-	-		-	-						
% Lelang laku sukarela nilai <=500.000											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capaian IKU											22,73%	43,18%	43,18%	35,62%	35,62%	64,55%	64,55%
5c-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK														
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		22	44	44	73	73		220	220						
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	-	-	-	-		-	-						
Capaian realisasi e-Auction											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian Realisasi e-Conventional Auction											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capaian IKU											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5d-CP	P/M	Deviasi Data PNPB Fungsional D/RN	MIN/TLK														
a		Deviasi Data PNPB Lelang	10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
b		Deviasi Data PNPB Piutang Negara	15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
Rata-Rata Target											12,5%						
Capaian IKU											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6		Edukasi yang efektif															
6a-M	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/TLK														
		Target/Realisasi	90,50		93,80	93,80				94,85	94,85						
Capaian IKU											93,80	93,80	93,80	94,85	94,85		
7		Pengawasan dan pengendalian yang efektif															
7a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK														
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		4	4					4	4						
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		6	6					7	7						
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020		4	4					4	4						
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021		7	7					7	7						
Capaian IKU											90,91%	90,91%	90,91%	100,00%	100,00%		



8		SDM yang kompeten							
8a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK						
		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		7	12	12	18	18	18
		Jumlah bawahan total		18	18	18	18	18	18
		% Capaian Utama		38,89%	66,67%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		7	10	10	17	18	18
		Jumlah bawahan total		18	18	18	18	18	18
		% Capaian Tambahan		38,89%	55,56%	55,56%	94,44%	94,44%	100,00%
		Capaian IKU		66,67%	77,78%	77,78%	118,89%	118,89%	120,00%
9		Organisasi yang fit for purpose							
9a-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	MAX/TLK						
		Target/Realisasi	75					97	97
		Capaian IKU						128,91%	128,91%
9b-N	P/M	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/TLK						
		Target/Realisasi	80	97,20	96,50	96,85	98,40	97,37	97,30
		Capaian IKU		97,20	96,50	96,85	98,40	97,37	97,35
10		Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK						
		Target/Realisasi	95,50%	100,00%	98,49%	98,49%	99,49%	99,49%	99,20%
		Capaian IKU		100,00%	98,49%	98,49%	99,49%	99,49%	99,20%



Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Lahat, kami sajikan capaian KPKNL Lahat pada tahun 2020, 2019 dan 2018. Rincian indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Lahat. Adapun target dan capaian kinerja KPKNL Lahat pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

2. PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN SEBELUMNYA

Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang			159,97%
		1. PNBPN Aset	2.081.296.961	2.191.000.712	
		2. PNPB PN	1.636.158	29.792.459	
		3. PNBPN Lelang	3.613.933.119	3.560.540.234	
		Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	2.223.978.027	299.237.109	13,46%
		Persentase pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	43	43	100%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,59	4,66	4,66
3	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	31.430.000.000	68.630.659.124	160,23%
		a. Pokok Lelang Kelas I	16.500.000.000	8.165.366.700	
		b. Pokok Lelang Pegadaian	47.930.000.000	76.796.025.824	



INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas		87	99.62	99.62
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang				
5	Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	63	63	100%
		Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	5	3	50%
		BKNP Kategori I (s.d. 31 Des 2010)		0	
		BKNP Kategori II (1 Jan 2011 s.d. 31 Des 2019)		2	
		BKNP Kategori II (1 Jan 2011 s.d. 31 Des 2019)		1	
		Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	193.087.225.561	375.361.375.969	194,40%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	10	12	120%
6	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,00%	200%
7	Tata Kelola lelang yang efektif	Persentase produktivitas lelang	100%	55,30%	55,30%
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Secara Keseluruhan		167	
		Jumlah Frekuensi Lelang Secara Keseluruhan		302	
		% Lelang Laku Keseluruhan		55,30%	
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau Perorangan dengan Nilai dibawah atau sama dengan Rp 500.000		-	



		Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp 500.000		-	
		% Lelang laku sukarela nilai =<500.000		-	
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction		100%	100%
		Jumlah realisasi frekuensi e-auction		302	
		Jumlah realisasi frekuensi e-conventional asuction		-	
8	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90,26	95,40	105,69%
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset		100%	100%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 yang ditindaklanjuti oleh K/L		10	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		0	



		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019		10	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2020		0	
		Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	1.182	1.185	100,25%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
10	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		120%	120%
11	Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	82	81,63
		Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	92,98	92,98
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,74%	99,74%

Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2018 s.d. 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan	108.64	100.87	101.53	103.70
2	Persentase hasil lelang	85.92	86.50	160.23	120
3	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100.58	104.88	105.69	104.23
4	Persentase implementasi e-auction	92.35	111.11	111.11	108.70
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.32	104.64	104.98	103.87

Catatan:

Indikator Utama yang dibandingkan hanyalah indikator utama yang terdapat pada setiap tahunnya agar dapat dilakukan perbandingan.



3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Lahat Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2021 sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila dapat mewujudkan APBN yang efektif dan efisien. Upaya untuk mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yaitu:

Sasaran Strategis I
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
- Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)
- Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara





Sasaran Strategis II

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa ialah pelayanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh stakeholder maupun pihak internal. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Persentase Realisasi Pokok Lelang.

- Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Ukuran untuk mengetahui penyelesaian permohonan 13 SOP Layanan Unggulan KPKNL yang telah ditetapkan dengan KMK Nomor 187/KMK.01/2010 dan diubah dengan dengan KMK Nomor: 35/KMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

Pengukuran difokuskan pada kesesuaian prosedur dan batas waktu penyelesaian yang sesuai dengan janji layanan dalam SOP Layanan Unggulan. Untuk rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 88 telah terealisasi sebesar 99,49 atau 113,06% dari target.

- Persentase realisasi pokok lelang

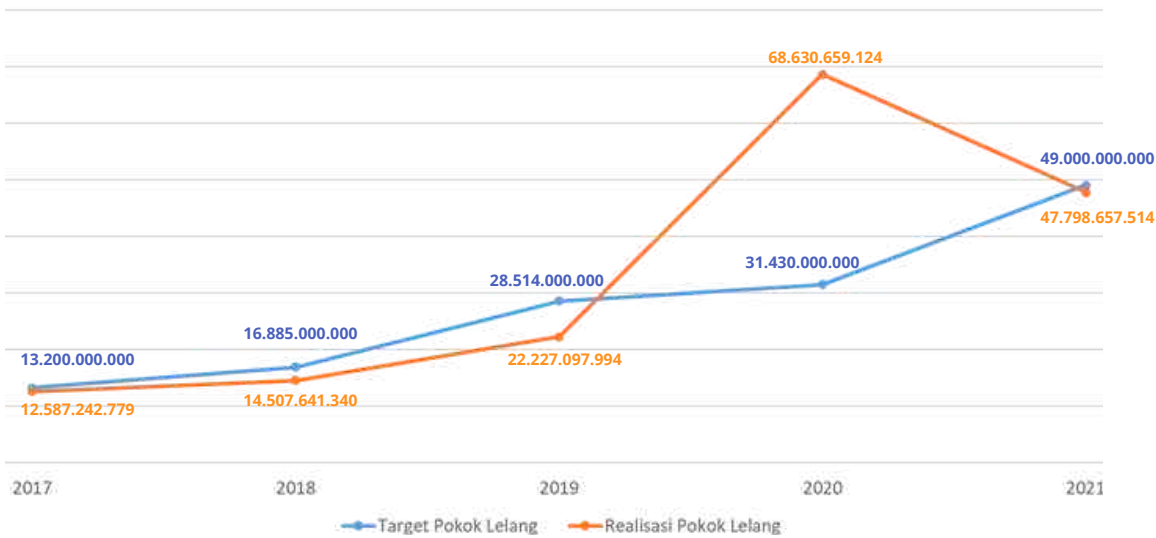
Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului dengan adanya pengumuman lelang dapat menghasilkan lelang yang kompetitif dan hasilnya maksimal. Hasil lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari adanya peminat lelang dan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang. Dari pelaksanaan lelang tersebut dipungut bea lelang pembeli dan penjual yang masing-masing kategori lelang memiliki besaran persentase bea lelang sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU guna mencapai sasaran strategis dimaksud yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.



Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II dalam periode tertentu.

Jumlah pokok lelang yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 47.798.657.514,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 49.000.000.000,00 atau dalam persentase sebesar 97,55% dari target 100%.

Capaian Pokok Lelang KPKNL Lahat Tahun 2021



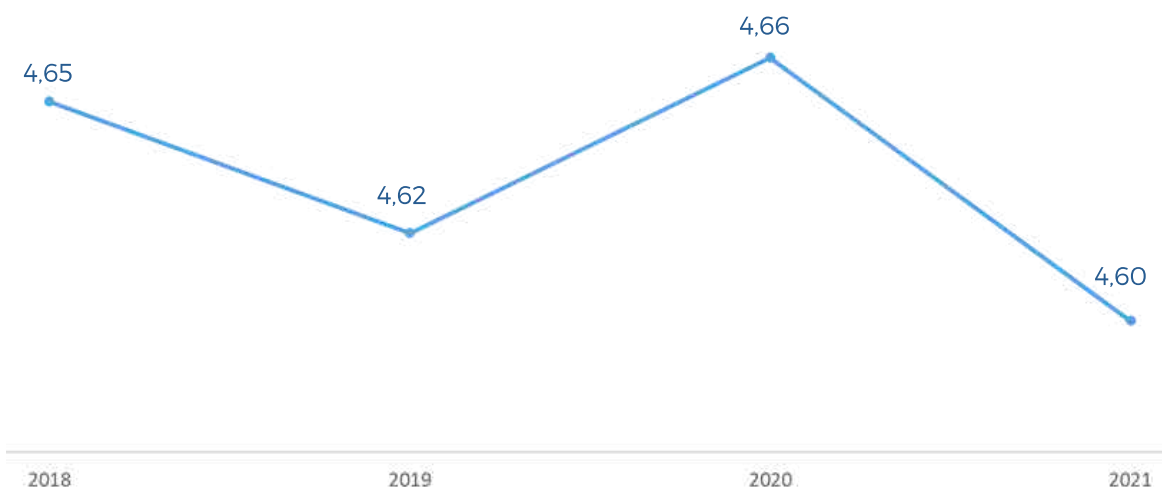


Sasaran Strategis III

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan yang dilakukan KPKNL Lahat. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra organisasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu **Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL**, yang merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survey lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan. Untuk tahun 2021, Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Lahat adalah sebesar 4,60 dengan nilai maksimal 5 dimana target awal di tahun 2020 adalah sebesar 4,66.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan



Grafik di atas menunjukkan perbaikan dalam peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL Lahat menuju kesempurnaan pelayanan



Sasaran Strategis IV

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif, KPKNL Lahat mengidentifikasi 3 (tiga) IKU antara lain:

- **Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan**
Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan merupakan IKU baru bagi KPKNL pada tahun 2021 dengan target sebanyak 106 bidang tanah yang kemudian diaddendum menjadi 242 bidang tanah, telah terealisasi sebanyak 242 bidang tanah atau 100% dari target. Upaya ini untuk mendukung pelaksanaan Program Pemerintah terkait sertipikasi tanah BMN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah
- **Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**
Persentase objek BMN yang telah dievaluasi pada tahun 2021 sebanyak 36 NUP atau 120% dari target sebanyak 30 NUP.
- Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu dan berdasarkan survey terhadap objek penilaian dan data-data yang memadai untuk memperoleh opini nilai wajar atas suatu aset.

Ruang lingkup penilaian adalah penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara dan penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara. Penyelesaian permohonan penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis penilaian yang berkualitas, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu **Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**.



Sasaran Strategis V

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif, KPKNL Lāhat mengidentifikasi 4 (empat) IKU antara lain:

- **Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**

Berkas Kasus Pengurusan Piutang Negara (BKPN) merupakan berkas yang berisi dokumen bukti tahapan pengurusan Piutang Negara dan diberi nomor/kode register BKPN sesuai dengan tahun penyerahan Piutang Negara kepada PUPN/DJKN. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan merupakan jumlah BKPN yang dihentikan/selesai tahapan pengurusan piutangnya dikarenakan BKPN tersebut lunas, BKPN ditarik oleh penyerah piutang untuk dilakukan restrukturisasi, BKPN ditetapkan sebagai Piutang Negara Belum Dapat Diselesaikan (PSBDT) atau BKPN dikembalikan kepada penyerah piutang.

Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, penarikan, PSBDT, pengembalian) oleh KPKNL Lāhat pada tahun 2021 adalah sebanyak 26 debitur dari target 19 debitur.

- **Persentase Produktivitas Lelang**

IKU untuk Persentase Produktivitas Lelang terdiri atas penggabungan target persentase jumlah frekuensi lelang yaitu seberapa banyak pelaksanaan lelang selama tahun 2021 serta target jumlah frekuensi lelang yang laku. Target persentase jumlah frekuensi lelang pada tahun 2021 adalah sebesar 35% dari total frekuensi lelang (220 kali) dengan jumlah frekuensi lelang yang laku sebanyak 142kali sehingga capaian akhirnya sebesar 64,55%.



- **Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction**

E-auction merupakan IKU yang baru pada tahun 2015 menjadi terobosan baru pelaksanaan lelang dan dilanjutkan pada tahun 2021 ini. Berbeda dengan pelaksanaan selama ini yang dilakukan secara konvensional, untuk e-auction dilakukan melalui sarana jaringan internet, di mana pembeli tidak harus datang ke tempat lelang.

Untuk IKU Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction memiliki target 100% di tahun 2021 dan telah tercapai sebesar 100%

- **Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

belum tau deskripsinya apa disini, coba tanya ke KI, adakah penjelasan IKU Deviasi data PNBP Fungsional DJKN



Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan diperlukan ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan fungsi DJKN. Bentuk peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara efektif dan komprehensif. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu **Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**.

Sasaran
Strategis VI

Edukasi yang
Efektif

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (*stakeholder*) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisai yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan. Indeks tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Lahat pada tahun 2021 adalah sebesar 94,33 dari target 90,50 dengan indeks capaian 104,23 %.

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi KPKNL Lahat

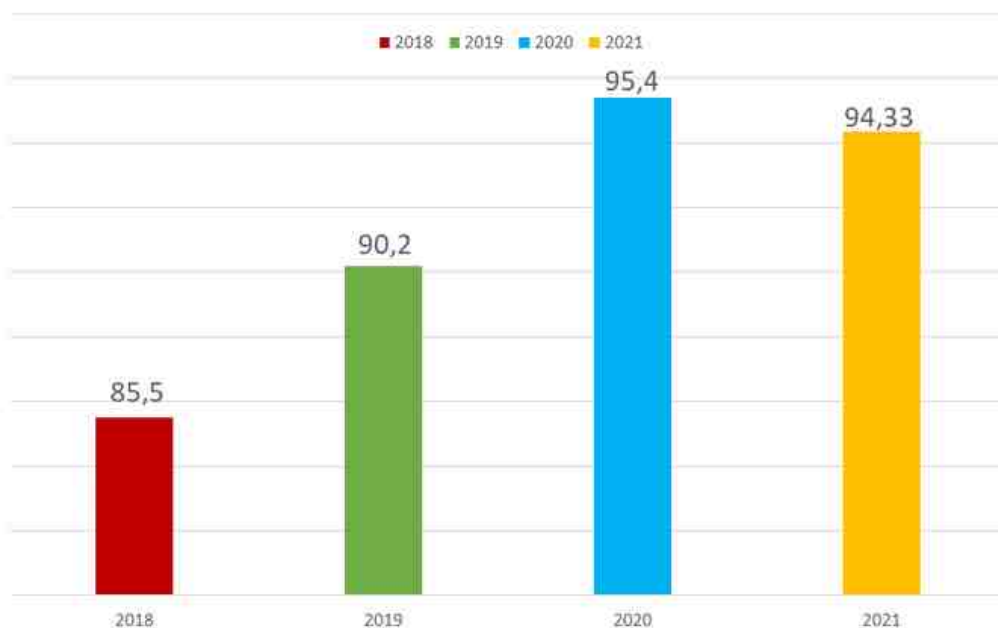


Diagram di atas menunjukkan bahwa KPKNL Lahat terus menerus melakukan perbaikan menuju kesempurnaan. Tahun demi tahun KPKNL Lahat melakukan evaluasi agar dapat terus memberikan kontribusi pada masyarakat. Diharapkan KPKNL Lahat semakin dapat berkontribusi lebih untuk masyarakat dan pelaku ekonomi di tahun mendatang.



Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai saran/rekomendasi/bahan perbaikan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu [Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara](#).

Sasaran Strategis VII

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 adalah 85%, realisasi selama tahun 2021 adalah 100% atau 117,65% dari target yang telah ditetapkan.





Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi diharapkan Pengelolaan Kekayaan Negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang dapat dilakukan secara profesional. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu [Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai](#).

Sasaran Strategis VIII

SDM yang Kompeten

Sasaran strategi SDM yang kompetitif dengan indikator kinerja utama dengan IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan target tahun 2021 sebesar 100% dari keseluruhan jumlah pegawai dapat tercapai dengan hasil capaian sebesar 120% atau telah mencapai 120% dari target.

Pengembangan kompetensi pegawai diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kompetensinya di bidangnya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan maupun diklat, *workshop*, seminar, sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPPK, internal DJKN, maupun internal satker.





Penataan organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksanaan teknis, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Nilai hasil review pengelolaan kinerja dan Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

Sasaran
Strategis IX

Organisasi
yang Fit for
Purpose

- **Nilai hasil review pengelolaan kinerja**

Review pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 senilai 75 dapat terpenuhi dengan capaian senilai 97.43 atau 120%.

- **Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator**

Target penyelenggaraan FGD pejabat administrator di tahun 2021 senilai 80 dapat terpenuhi dengan capaian senilai 97.35 atau 121.69%.





Sasaran Strategis X

Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sasaran strategis ini dapat diukur tingkat daya serap Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu [Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran](#).

Implementasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat diukur dari 4 (empat) komponen yaitu:

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk *softblocking*, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas, rapat dalam kantor, konsinyering/paket *meeting*, kudapan/makan siang rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim, honorarium, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK, proses pengadaan barang/jasa, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratus persen (100%).
- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA atau RPD revisi pertama, atau RPD revisi pertama setelah APBN-P, atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan *selfblocking*.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 95,50% dan realisasi sebesar 99,20%. Secara rinci dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

NO	INDIKATOR IKPA	BOBOT	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
1	Pengelolaan UP	8%	100.00%	8.00%
2	Data Kontrak	0%	0.00%	0.00%
3	Kesalahan SPM	5%	100.00%	5.00%
4	Retur SP2D	5%	100.00%	5.00%
5	Hal. III DIPA	5%	90.44%	4.52%
6	Revisi DIPA	5%	100.00%	5.00%
7	Penyelesaian Tagihan	0%	0.00%	0.00%
8	Kinerja Capaian Output	17%	99.29%	16.88%
9	Rekon LPJ	5%	100.00%	5.00%
10	Perencanaan Kas	0%	0.00%	0.00%
11	Realisasi	15%	100.00%	15.00%
12	Pagu Minus	5%	100.00%	5.00%
13	Dispensasi SPM	5%	100.00%	5.00%
Total		75%		74%
Capaian IKU		99.20%		

Antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pengeluaran riil tiap bulannya seringkali tidak sesuai sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk pencapaian target IKU ini antara lain membuat prognosa rencana kerja tiap-tiap seksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran, sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran menjadi baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA- 015.09.2.506126/2021 tanggal 23 November 2020, adalah sebesar Rp 1.405.871.000 yang kemudian direvisi pada tanggal 16 November 2021 menjadi Rp 1.136.107.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.120.912.570 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 98,66%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 100% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal

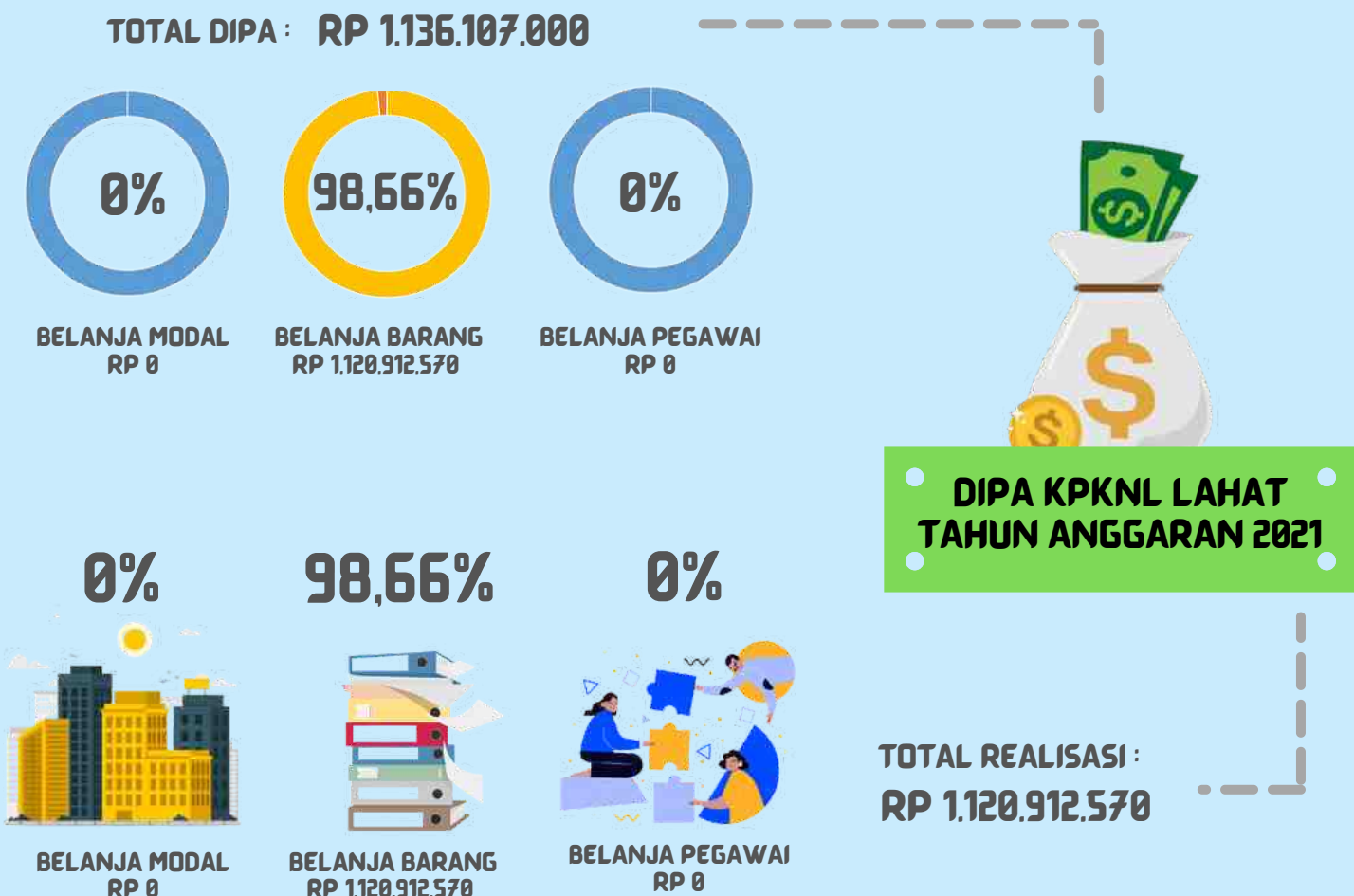
Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar 100%.

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.136.107.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.120.912.570 atau sebesar 98,66%.

3. Belanja Pegawai

Dana yang dianggarkan untuk belanja pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar 100%.



Selama tahun 2021 KPKNL Lahat telah mendapatkan beberapa penghargaan (*achievement*) di bidang Pengelolaan Keuangan dan Mutu Penyediaan Layanan dengan perincian sebagai berikut:

- Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Tidak Ada Temuan Pemeriksaan dari BPK RI atas Penyusunan Laporan Keuangan DJKN Tahun 2019 BA 015 Kementerian Keuangan;
- Satuan kerja dengan Nilai Indeks "Kecepatan, Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian Laporan" Tertinggi Pertama Periode Semester Kedua Tahun 2020;
- Juara 3 Lomba TikTok "Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Menjadi Bagian Keluarga DJKN" dalam rangka peringatan HUT ke-14 DJKN.
- Juara 2 :omba Masker dalam rangka

Piagam dan sertifikat di atas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LAKIN KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2021.

C. DATA DAN NARASI KINERJA LAINNYA





PENUTUP

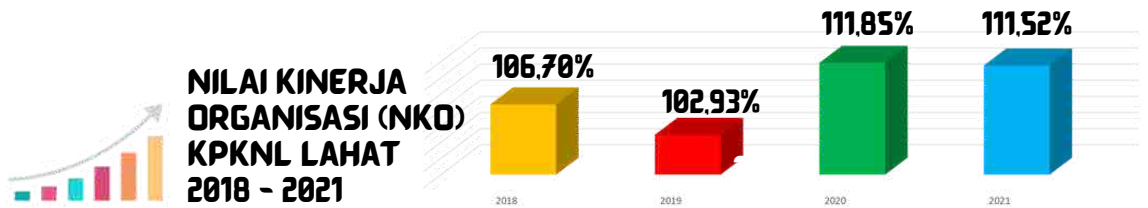




BAB 4

A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2021 dengan sangat baik. Seluruh target atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three*. KPKNL Lahat Tahun 2021 dapat tercapai dengan sempurna. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 111,52% dari nilai maksimal 120%.



Sebuah prestasi yang layak dipertahankan mengingat NKO pada tahun anggaran 2021 merupakan NKO tertinggi jika dibandingkan NKO pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi KPKNL Lahat dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Tahun 2021 adalah Rp 1.120.912.570 dari anggaran sebesar Rp Rp 1.136.107.000 atau terealisasi sebesar 98,66%.



KENDALA

Dalam perjalanannya, KPKNL Lahat menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Lahat, pegawai KPKNL Lahat di tahun 2021 berjumlah 23 (dua puluh tiga) Orang serta jabatan struktural Kepala Seksi Piutang Negara kosong dengan sebaran wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dengan proses jual beli secara lelang yang mengakibatkan jumlah barang yang laku di wilayah KPKNL Lahat masih rendah, terutama untuk lelang eksekusi hak tanggungan.
3. Banyaknya lelang yang diestimasikan akan laku menjadi batal karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur.
4. Kultur budaya dimana biasanya orang enggan membeli barang lelang dikarenakan masih terikat hubungan kekerabatan, terutama pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta adanya anggapan bahwa barang lelang adalah barang bermasalah.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
6. Cukup banyak satuan kerja dari *stakeholder* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
7. Penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
8. Wilayah kerja KPKNL Lahat yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas;

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Lahat adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Lahat agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Lahat lebih fokus untuk menetapkan dan menerangkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Lahat adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengoptimalkan Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang, utamanya lelang Barang Milik Daerah (BMD)
6. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
9. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegoatan yang bersifat lintas unit;
10. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
11. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi Kekayaan Negara dan sertifikasi BMN.



Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Tahun Anggaran 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Lahat.

Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholder* serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun - tahun berikutnya.

Lahat, 31 Januari 2022
Kepala Kantor

MASDJAYA



LAMPIRAN

KNL
LAHAT





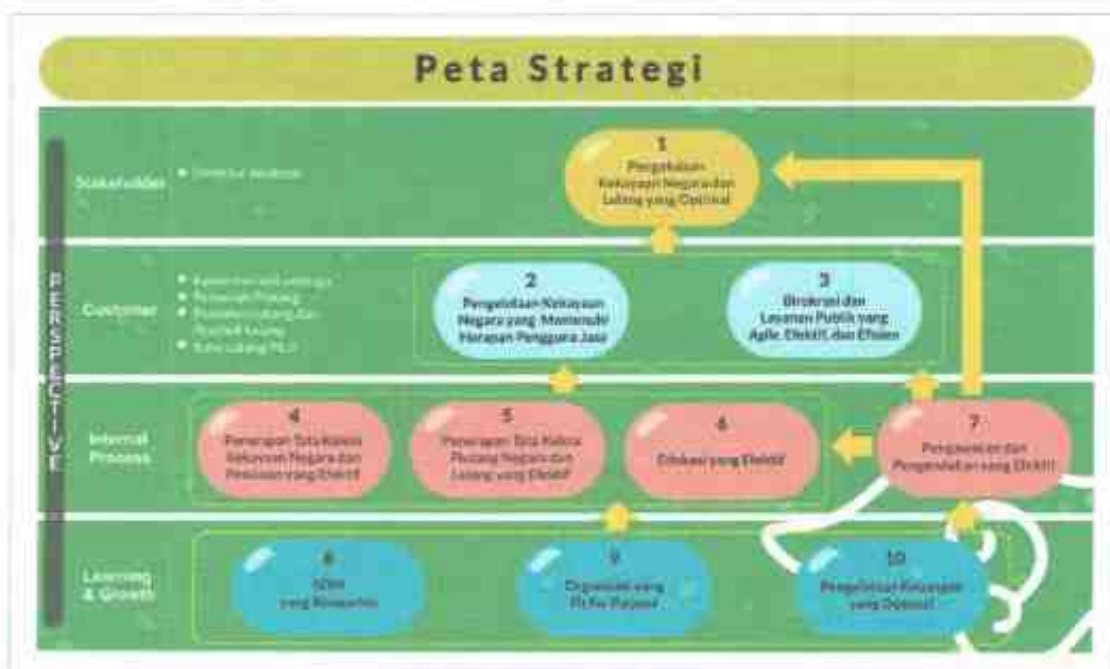
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 10.1/KN.16/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,60
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90,50
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	-	-	-	-	40%	40%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	-	-	-	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Poltek Lelang	-	-	-	-	-	30%	30%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,60	4,60
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	-	-	-	-	40%	40%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	-	-	-
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	-	-	-	-	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	-	-	-	-	-	-
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	-	-	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	90,50	90,50
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	-	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
9a-N	Nilai Revisi Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%

Palembang, Oktober 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Lahat,



MasJaya

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	71.594.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.312.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	4.000
3. Pengelolaan Aset	70.278.000
Dukungan Manajemen	1.064.513.000
1. Legislasi dan Litigasi	12.708.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.047.039.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.348.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3.418.000

Palembang, Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan,
Jambi, dan Bangka Belitung,

Surya Hadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Leang Lahat,

Masdjaya

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Pemangung Jawab	Biaya
1	<p>SK: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</p> <p>DKU: Persentase realisasi pemertaman negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang</p>	Optimalisasi BMN (BDN)	<p>I. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.</p> <p>II. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terdapat underutilized/ idle yang sedang dimanfaatkan dijadikan pemanfaatannya</p>	3 Bulan	Seasi Pengelolaan Kekayaan Negara	

Palembang, Oktober 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Lahat,


Masdjaya

SASARAN KINERJA PEGAWAI

KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN PERIODE PENILAIAN
 JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN I OKTOBER S.D. 31 DESEMBER 2021
 LELANG LAHAT

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Masdjaya	NAMA	Surya Hadi
NIP	197601231998031001	NIP (*opsional)	196304211992031002
PANGKAT/GOLR UANG	Pembina / IV.a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV.d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA	
		INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1.1 Tingkat Kesesuaian BMN dengan SSSK	62%
		1.2 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	40%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1 Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88
		2.2 Persentase Realisasi Pollok Lelang	30%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Karwil dan KPKNL	4,60
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4.1 Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	40%
		4.2 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5.1 Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5.2 Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction	92%
		5.3 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6.1 Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,50
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7.1 Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
8	SOM yang Kompeten	8.1 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose	9.1 Nilai Revisi Pengelolaan Kinerja	75

		9.2 Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
B. KINERJA TAMBAHAN			
1			

Palembang, Oktober 2021

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Masdujaya

NIP 197601231998031001



Surya Hadi

NIP 19630421 199203 1 002

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective (25%)								27,75%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						110,89%		
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	91,54%	19%	40%	147,6377%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	106,22%	14%	30%	106,22%	106,22%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PND5 s.d 2017)	P/M	100%	104%	14%	30%	103,54%	103,54%	hijau
Customer Perspective (15%)								15,61%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						104,37%		
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88,00	99,49	11%	44%	113,06%	113,06%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	97,55%	14%	56%	97,55%	97,55%	kuning
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien						103,70%		
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,60	4,77	21%	100%	103,70%	103,70%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								33,78%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						111,36%		
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	19%	43%	100,00%	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	25%	120,00%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	14%	32%	200,00%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						117,17%		
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (addendum)	P/M	100%	130,00%	14%	25%	130,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	64,55%	14%	25%	184,42%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventik	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif						104,23%		
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,50	94,33	14%	100%	104,23%	104,23%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						117,65%		
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100,00%	14%	100%	117,65%	117,65%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								34,39%	
8	SDM yang kompeten						120,00%		
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose						120,00%		
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	97,43	14%	50%	129,91%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,35	14%	50%	121,69%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						103,87%		
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	99,20%	14%	100%	103,87%	103,87%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,52%	hijau

Mengetahui,

Kepala KPKNL Lahat



Ditandatangani secara elektronik
Masdjaya
 NIP 19760123 199803 1 001



Kepala Seksi Kepatuhan Internal
 Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Dhani Abdul Basieth
 NIP 19770904 199803 1 001

